

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, dalam pelaksanaannya menegakkan keadilan dibantu oleh perantara yaitu pihak kepolisian. Semua pergerakan dan penyelenggaraan kelembagaan negara, institusi kenegaraan, birokrasi pemerintahan, dan unit pelayanan pada dasarnya mesti berjalan dan bekerja dalam kerangka Negara Hukum. Polri adalah salah satu institusi strategis kenegaraan, dan juga merupakan salah satu institusi kenegaraan yang memiliki fungsi, tugas, tanggungjawab, dan kewenangan di bidang hukum.¹

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.²

¹TimesIndonesia, Rabu 17 Juli 2019 : *Polri, Negara Hukum Pancasila, dan Tantangan Indonesia Maju*, dalam <https://www.timesindonesia.co.id/read/220740/20190717/080813/polri-negara-hukum-pancasila-dan-tantangan-indonesia-maju>/diakses hari Rabu 9 Oktober 2019 pukul 14.48

² Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hal.6

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 10 Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”*.

Pekerjaan Polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan wewenang polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit. Lebih di Indonesia, di mana polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negara-negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat mejemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda. Wewenang polisi untuk menyidik, yang meliputi kebijaksanaan polisi sangat sulit. Membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan di mana tercantum delik itu dalam perundang-undangan pidana. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi, yang cocok dengan perumusan delik tersebut.³

³ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 78-79

Permasalahan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri yang penyidik, dan pegawai negeri sipil yang PPNS itu selalu banyak mengalami pasang surut. Pasang surut itu dapat berbentuk tidak segera tuntasnya penyelidikan atau tuntasnya penyidikan dengan beberapa catatan, misalnya selesainya pemberkasan, tetapi apabila dicermati masih mengandung kelemahan-kelemahan yang sangat fatal misalnya kesalahan menuliskan dasar hukum penyidikan yang biasanya berupa kesalahan penulisan angka pada register laporan polisinya.⁴

Hampir semua orang berkeinginan untuk sehat. Kesehatan selalu dipertahankan oleh setiap orang dalam dirinya. Badan yang sehat sesungguhnya suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentang narkoba, istilah populer di tahun 1998, karena banyaknya terjadi berbagai peristiwa penggunaan atas pemakaian barang-barang narkotik dan psikotropika, dan obat-obat adiktif yang dilarang. Pelarangan itu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai konsekuensi dari negara hukum. Hukum dipergunakan sebagai alat pengendalian sosial.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

⁴Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 57-58

⁵Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, hal. 1-8

Di tengah ingarbingarnya isu globalisasi, kejahatan narkotik dan psikotropika sudah sejak lama menjadi musuh bangsa yang mengkhawatirkan. Geliat mafia seakan tak mampu terbedung oleh gebrakan aparat penegak hukum di berbagai belahan komitmen bersama memberantas narkotik dan psikotropika oleh seluruh dunia. Tak sedikit badan-badan dunia yang terlibat, tetapi peredaran narkotik terus merajalela. Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotik dan psikotropika merupakan *extra ordinary crime*. Adapun pemaknaannya adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Untuk itu, *extra ordinary punishment* kiranya begitu menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa dewasa ini kian merambahi ke seantero bumi ini sebagai transnational crime.⁶

Kejahatan narkotik dan psikotropika semakin menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Bukan hanya pemakaiannya yang sangat memprihatinkan, tetapi juga industri secara gelap terhadap narkotik dan psikotropika justru yang terbesar di dunia dilakukan di Indonesia. Kejahatan narkotik dan psikotropika selain masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan. Berdampak pada perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan, dan dapat berakibat kerusakan akhlak dan moral suatu bangsa. Dalam sejarahnya, perang terhadap narkotik dan psikotropika dapat mengakibatkan hubungan antar negara menjadi terganggu. Karenanya,

⁶Romli Atmasasmita, 1999, *Narkotik & Penegakan Hukumnya*, Bandung : Eresco, hal. 17

kejahatan ini harus mendapatkan perhatian yang sistematis. Penyalahgunaan narkotik merupakan jenis kejahatan yang mempunyai potensi atau dampak sosial yang sangat luas dan kompleks. Terlebih ketika yang melakukannya adalah anak-anak. Maka dampak sosial akan menimbulkan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat panjang. Namun, kompleksitas dalam penanggulangannya menimbulkan masalah yang sangat rumit.⁷

Penyalahgunaan narkotik dan psikotropika, adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.⁸

Dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Sragen (Polres Sragen) banyak sekali kasus penyalahgunaan Narkotika yang mana Narkotika sudah beredar luas di masyarakat yang membuat masyarakat resah dan melaporkan ke pihak Kepolisian, Narkotika banyak ditemukan baik pada saat melakukan razia ataupun saat penggerebekan rumah seorang bandar narkotika. Karena banyak kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Sragen membuat pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia turun tangan dalam melaksanakan penegakan hukum agar kasus penyalahgunaan Narkotika menjadi kecil angkanya dan diharapkan menjadi hilang atau nihil.

⁷Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang : UMM Press, hal. 17

⁸Badan Narkotik Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta : Tanpa Penerbit, hal. 36

Dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, barang bukti merupakan hal yang penting sebagai pembuktian suatu tindak pidana. Tak jarang para penyidik kehilangan barang bukti yang membuat proses penyidikan semakin lama dan tertunda.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi yang diberikan kepada Pelaku apabila dengan sengaja menghilangkan barang bukti tindak pidana Narkotika?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pencarian barang bukti oleh Penyidik Polri dan Penyidik PNS?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Penyidik dalam pencarian barang bukti pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang diberikan kepada Pelaku apabila dengan sengaja menghilangkan barang bukti tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memaparkan perbandingan pelaksanaan pencarian barang bukti oleh Penyidik Polri dan Penyidik PNS.
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Penyidik dalam pencarian barang bukti pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan ilmu pengetahuan, memberikan gambaran, serta menjadi acuan, referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi tambahan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada mengenai peranan Penyidik Polri dalam Pencarian Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *“Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Dalam menegakkan keadilan di Indonesia, kepolisian berperan sebagai penyidik dalam hal yang terkait dengan tindak pidana Narkotika. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, kepolisian dibantu oleh penyidik PNS.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Kejahatan narkotik memang sudah lama menjadi musuh utama dalam bangsa ini terlebih penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahun ke tahun dan merambah pada semua kalangan.

Deputi Pencegahan BNN, Irjen Ali Djohardi Wirogioto menyebut Indonesia menjadi pangsa terbesar narkoba di tingkat Asia. Mirisnya lagi seluruh jenis narkotika digunakan dan tersebar di Tanah Air. Ali Djohardi menyebut pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia mengonsumsi setidaknya 65 jenis narkoba. Banyaknya narkoba yang tersebar akibat meledaknya angka permintaan terhadap barang haram itu.⁹

Peran Penyidik POLRI maupun Penyidik PNS pun makin berat, lantaran keberadaan penyalahgunaan narkotika yang mana makin meningkat. Penyalahgunaan narkotik, adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum, yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial.¹⁰

Dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik POLRI maupun penyidik PNS dalam praktiknya menuntaskan kejahatan tindak pidana Narkotika memiliki beberapa kendala di lapangan. Yang paling fatalnya adalah hilangnya barang yang dipergunakan sebagai barang bukti, yang mana

⁹ OkeNews, Kamis 20 Juli 2017 : *BNN: Indonesia Pangsa Narkoba Terbesar di Asia*, dalam <https://nasional.okezone.com/read/2017/07/20/337/1740698/bnn-indonesia-pangsa-narkoba-terbesar-di-asia> diakses hari Rabu 13 November 2019 pukul 19.40

¹⁰ Badan Narkotik Nasional, 2009, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*, Jakarta : Tanpa Penerbit, hal. 36

keberadaannya sangat penting. Tak jarang membuat proses penyidikan semakin lama dan tertunda.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.¹¹ Penulis dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.¹² Penulis menggunakan metode ini karena permasalahan yang diteliti terkait peraturan yang berhubungan dengan data yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang umum.¹³ Di sini penulis bermaksud untuk memberikan data dan informasi yang jelas serta akurat tentang Peranan Penyidik Polri

¹¹ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, hal. 16

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, hal. 19.

¹³ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 29

dalam Pencarian Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Kepolisian Resor Sragen (Polres Sragen) yang mana lokasi ini merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis agar dalam melakukan penulisan ini berjalan dengan baik serta terdapat sumber data-data yang dijadikan bahan untuk penulisan.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.¹⁴ Di sini penulis memperoleh data melalui wawancara terhadap narasumber yang mengetahui informasi-informasi terkait penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu meliputi Peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang relevan, dan buku-buku penunjang lainnya.¹⁵ Data sekunder mencakup :

- 1) Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

¹⁴ Burhan Bungin, 2013, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Jakarta : Kencana, hal. 128

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, hal. 196

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti literatur, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

G. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni penulis mencari, menemukan, melakukan inventarisasi, tentang regulasi yang berkaitan dengan peranan penyidik Polri dalam pencarian barang bukti pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Studi Lapangan

Dengan wawancara yang mana penulis mewawancarai langsung penyidik yang ada di Polres Sragen guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar dan akurat.

H. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan

implementasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁶ Penulis ingin menguraikan secara teliti dan jelas mengenai objek yang akan di teliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam melakukan pembahasan, menjabarkan dan menganalisis pada penelitian ini, penulis dalam penyusunan skripsi ini melakukan penulisan dengan cara sebagai berikut :

Pendahuluan, menguraikan dan menjabarkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Tinjauan Pustaka, menguraikan, memaparkan dan menjabarkan tentang tinjauan umum yang berhubungan dengan Penegakan Hukum, Peran Penyidik, Pengertian Narkotika, Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika, Pengertian Barang Bukti.

Hasil penelitian dan Pembahasan, menguraikan menjabarkan serta memaparkan tentang Peranan Penyidik Dalam Pencarian Barang Bukti Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika khususnya di daerah hukum Kabupaten Sragen.

Penutup, menguraikan dan menjabarkan kesimpulan penelitian dan saran.

¹⁶ Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 11